

## REIMAJINASI AKUNTANSI SOSIAL: MODEL AKUNTABILITAS BERBASIS RITUAL DAN NORMA ADAT DI KAMPUNG CIKONDANG

Oleh:

**Tiara<sup>1</sup>**

**Febrianti Nur Gunawan<sup>2</sup>**

**Airis Febriyanti Sugandi<sup>3</sup>**

**Widiya Zahrah<sup>4</sup>**

**Dina Salsa Agisni<sup>5</sup>**

**Nazla Marsha Lauda Jauhar<sup>6</sup>**

Universitas Pasundan

Alamat: JL. Tamansari No.6-8, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat (40116).

Korespondensi Penulis: [Tiarataya01@gmail.com](mailto:Tiarataya01@gmail.com), [gunawanipey24@gmail.com](mailto:gunawanipey24@gmail.com),  
[airisfebriyanti@gmail.com](mailto:airisfebriyanti@gmail.com), [widiyazahraa12@gmail.com](mailto:widiyazahraa12@gmail.com), [dinasalsaagisni@gmail.com](mailto:dinasalsaagisni@gmail.com),  
[nazlamarshalaudajauhar01@gmail.com](mailto:nazlamarshalaudajauhar01@gmail.com).

***Abstract.** This study aims to reimagine the concept of social accounting through an in-depth study of accountability mechanisms based on rituals and customary norms in the traditional village of Cikondang. The focus of this study is to understand how oral, symbolic, and communal cultural systems are able to perform oversight, reporting, and accountability functions without formal accounting instruments. This study examines forms of social accountability that arise from customary practices, including village deliberations, ratification rituals, and unwritten rules that govern collective behavior. The main objectives are to identify the role of customary values in building accountability, describe the communal-based reporting process, and formulate a model of social accounting based on local wisdom that is relevant both theoretically and practically. The method used is a qualitative approach with a mini-ethnographic design,*

## **REIMAJINASI AKUNTANSI SOSIAL: MODEL AKUNTABILITAS BERBASIS RITUAL DAN NORMA ADAT DI KAMPUNG CIKONDANG**

*using participatory observation techniques, in-depth interviews, and cultural text documentation. The data were analyzed using thematic coding techniques to find the relationship between customary values and social control mechanisms. The results showed that accountability in Cikondang did not rely on formal records, but rather on collective legitimacy built through rituals and cultural norms. Deliberation served as an open reporting space, while rituals validated decisions and strengthened moral commitments among residents. Customary norms become an internal control that ensures the integrity of communal resource management. These findings prove that cultural practices can function as an effective social accounting system, while offering a conceptual alternative to modern accounting, which tends to be formalistic.*

**Keywords:** Social Accounting, Customary Accountability, Rituals, Cultural Norms, Local Wisdom, Cikondang Traditional Village.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mereimajinasikan konsep akuntansi sosial melalui kajian mendalam terhadap mekanisme akuntabilitas berbasis ritual dan norma adat di Kampung Adat Cikondang. Fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana sistem budaya yang bersifat lisan, simbolik, dan komunal mampu menjalankan fungsi pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tanpa instrumen akuntansi formal. Kajian ini menelaah bentuk-bentuk pertanggungjawaban sosial yang lahir dari praktik adat, termasuk musyawarah kampung, ritual pengesahan, serta aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku kolektif. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi peran nilai adat dalam membangun akuntabilitas, menggambarkan proses pelaporan berbasis komunal, dan merumuskan model akuntansi sosial berbasis kearifan lokal yang relevan secara teoretis maupun praktis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain etnografi mini, menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi teks budaya. Data dianalisis melalui teknik coding tematik untuk menemukan hubungan antara nilai adat dan mekanisme pengendalian sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas di Cikondang tidak mengandalkan pencatatan formal, melainkan legitimasi kolektif yang dibangun melalui ritual dan norma budaya. Musyawarah berfungsi sebagai ruang pelaporan terbuka, sementara ritual

mengesahkan keputusan serta memperkuat komitmen moral antarwarga. Norma adat menjadi kontrol internal yang memastikan integritas pengelolaan sumber daya komunal. Temuan ini membuktikan bahwa praktik budaya dapat berfungsi sebagai sistem akuntansi sosial yang efektif, sekaligus menawarkan alternatif konseptual bagi akuntansi modern yang cenderung formalistik.

**Kata Kunci:** Akuntansi Sosial, Akuntabilitas Adat, Ritual, Norma Budaya, Kearifan Lokal, Kampung Adat Cikondang.

## LATAR BELAKANG

Akuntansi sosial berkembang sebagai respon terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, pengelolaan sumber daya yang berkeadilan, serta pertanggungjawaban organisasi yang tidak hanya berorientasi pada aspek finansial tetapi juga sosial dan budaya. Dalam dua dekade terakhir, perkembangan akuntansi sosial dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan akuntabilitas publik, sebagaimana dikemukakan oleh Gray (2002) dan Mathews (2004) yang menekankan bahwa akuntansi sosial berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban moral organisasi kepada masyarakat luas. Seiring perkembangan tersebut, berbagai sektor mulai mengadopsi pengukuran dampak sosial melalui praktik akuntansi sosial sebagai bentuk legitimasi dan transparansi kepada para pemangku kepentingan.

Namun demikian, praktik akuntansi sosial modern hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan formalistik, seperti laporan tertulis, audit administratif, serta penggunaan standar internasional yang bersifat teknokratis. Pendekatan ini cenderung mengabaikan konteks sosial dan budaya lokal, sehingga kurang relevan ketika diterapkan pada komunitas adat yang memiliki sistem nilai, norma, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan pada Kampung Adat Cikondang di Kabupaten Bandung, yang menjalankan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban sosial secara turun-temurun melalui ritual adat, musyawarah kampung, serta aturan tidak tertulis yang mengikat secara kolektif. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai kontrol internal berbasis budaya yang efektif, meskipun tidak terdokumentasi dalam format akuntansi formal, sehingga menarik untuk dikaji dalam perspektif akuntansi sosial.

## **REIMAJINASI AKUNTANSI SOSIAL: MODEL AKUNTABILITAS BERBASIS RITUAL DAN NORMA ADAT DI KAMPUNG CIKONDANG**

Meskipun kajian mengenai masyarakat adat dan praktik budayanya telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus menempatkan mekanisme adat sebagai bagian dari sistem akuntabilitas dalam perspektif akuntansi sosial masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas komunitas adat lebih banyak dikaji dalam ranah antropologi, sosiologi, atau hukum adat, sehingga dimensi akuntansi sosial belum mendapat perhatian yang memadai. Selain itu, teori akuntansi sosial modern cenderung berorientasi pada mekanisme formal, tertulis, dan terstandarisasi, sehingga belum mampu menjelaskan praktik akuntabilitas yang bersifat simbolik, lisan, dan berbasis nilai spiritual sebagaimana dijumpai dalam masyarakat adat. Dari sisi metodologis, penelitian akuntansi sosial umumnya menggunakan pendekatan survei atau analisis dokumen, yang kurang relevan untuk memahami konteks adat yang hidup melalui praktik ritual, musyawarah, dan relasi sosial. Kesenjangan empiris, teoretis, dan metodologis inilah yang membuka ruang bagi penelitian ini untuk mereimajinasikan akuntansi sosial melalui pendekatan etnografi, dengan menempatkan ritual dan norma adat Kampung Cikondang sebagai sistem akuntabilitas alternatif yang kontekstual dan bermakna.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mereimajinasikan konsep akuntansi sosial melalui integrasi nilai-nilai adat, ritual, dan norma budaya sebagai mekanisme akuntabilitas sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada kontribusi teoretis dalam memperluas konsep akuntansi sosial agar lebih kontekstual dan inklusif terhadap praktik nonformal, kontribusi praktis dalam memberikan alternatif model akuntabilitas berbasis kearifan lokal, serta kontribusi metodologis melalui penggunaan pendekatan etnografi mini untuk memahami praktik pertanggungjawaban sosial dalam komunitas adat. simbolik, lisan, dan berbasis nilai spiritual sebagaimana dijumpai dalam masyarakat adat. Dari sisi metodologis, penelitian akuntansi sosial umumnya menggunakan pendekatan survei atau analisis dokumen, yang kurang relevan untuk memahami konteks adat yang hidup melalui praktik ritual, musyawarah, dan relasi sosial. Kesenjangan empiris, teoretis, dan metodologis inilah yang membuka ruang bagi penelitian ini untuk mereimajinasikan akuntansi sosial melalui pendekatan etnografi, dengan menempatkan ritual dan norma adat Kampung Cikondang sebagai sistem

akuntabilitas alternatif yang kontekstual dan bermakna. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka pertanyaan yang hendak penulis jawab yaitu bagaimana ritual dan norma adat membentuk mekanisme akuntabilitas sosial di Kampung Cikondang, bagaimana proses pertanggungjawaban diwujudkan melalui musyawarah, kegiatan budaya, dan sistem sosial komunal, dan bagaimana model akuntansi sosial berbasis nilai adat direimajinasikan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Akuntansi Sosial**

Akuntansi sosial merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dampak sosial dari aktivitas suatu organisasi atau komunitas terhadap masyarakat dan lingkungan. Gray (2002) menyatakan bahwa akuntansi sosial berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban moral dan sosial kepada para pemangku kepentingan di luar kepentingan ekonomi semata. Dalam perkembangannya, akuntansi sosial tidak hanya digunakan oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh sektor publik dan komunitas sosial. Namun demikian, praktik akuntansi sosial modern masih cenderung mengadopsi pendekatan formalistik yang berbasis dokumen tertulis dan standar baku. Hal ini menimbulkan keterbatasan dalam menangkap praktik pertanggungjawaban sosial yang bersifat nonformal, terutama pada komunitas adat yang memiliki sistem nilai dan mekanisme akuntabilitas berbasis budaya.

### **Konsep Akuntabilitas Sosial**

Akuntabilitas sosial merujuk pada kewajiban individu atau kelompok untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada masyarakat. Dalam konteks sosial-budaya, akuntabilitas tidak selalu diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan atau dokumen tertulis, melainkan dapat muncul melalui mekanisme sosial seperti norma, sanksi adat, dan pengawasan kolektif. Pada komunitas adat, akuntabilitas sosial bersifat komunal dan berbasis nilai moral. Legitimasi sosial diperoleh melalui kepatuhan terhadap adat, partisipasi dalam musyawarah, serta keterlibatan dalam ritual yang memiliki makna simbolik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada komunitas.

# **REIMAJINASI AKUNTANSI SOSIAL: MODEL AKUNTABILITAS BERBASIS RITUAL DAN NORMA ADAT DI KAMPUNG CIKONDANG**

## **Ritual dan Norma Adat sebagai Mekanisme Akuntabilitas**

Ritual adat merupakan praktik simbolik yang memiliki fungsi sosial sebagai penguat norma dan nilai kolektif. Dalam konteks akuntabilitas, ritual berperan sebagai sarana pengesahan keputusan, peneguhan komitmen moral, serta alat kontrol sosial. Sementara itu, norma adat berfungsi sebagai aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam komunitas dan menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya bersama. Keberadaan ritual dan norma adat memungkinkan terciptanya sistem akuntabilitas yang efektif tanpa bergantung pada instrumen akuntansi formal, karena kontrol sosial dijalankan secara kolektif dan berkelanjutan.

## **Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini memandang bahwa kesenjangan antara akuntansi sosial formal dan praktik budaya dapat dijembatani melalui pemahaman terhadap nilai adat. Ritual, musyawarah, dan norma adat diposisikan sebagai elemen utama dalam membentuk mekanisme akuntabilitas sosial. Kerangka pemikiran ini menempatkan budaya sebagai fondasi akuntansi sosial alternatif yang berbasis kearifan lokal..

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi mini. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik akuntabilitas sosial yang hidup dalam komunitas adat, khususnya yang bersifat simbolik, lisan, dan berbasis nilai budaya.

### **Lokasi dan Subjek Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Kampung Adat Cikondang, Kabupaten Bandung. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, sesepuh kampung, serta warga yang terlibat langsung dalam kegiatan musyawarah dan ritual adat.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, untuk mengamati langsung praktik musyawarah dan ritual adat. Wawancara mendalam, untuk menggali pemahaman informan mengenai mekanisme pertanggungjawaban sosial. Dokumentasi, berupa catatan budaya, arsip komunitas, dan literatur pendukung.

## **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan teknik thematic coding dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan akuntabilitas, ritual, dan norma adat. Analisis dilakukan secara iteratif untuk menemukan hubungan antara nilai budaya dan praktik akuntansi sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Akuntabilitas Sosial di Kampung Adat Cikondang**

Praktik akuntabilitas sosial di Kampung Adat Cikondang terlihat dari cara masyarakatnya mengatur kehidupan bersama berdasarkan adat dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Dalam kehidupan sehari-hari, pertanggungjawaban sosial tidak dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau aturan resmi, melainkan dijalankan melalui kepercayaan, kebiasaan bermusyawarah, dan kepatuhan terhadap norma adat yang berlaku. Tokoh adat, khususnya kuncen, memegang peran penting dalam menjalankan akuntabilitas sosial. Kuncen tidak hanya memimpin kegiatan adat, tetapi juga menjadi pihak yang dipercaya untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Setiap keputusan yang diambil biasanya dibicarakan terlebih dahulu dengan warga melalui musyawarah. Dengan cara ini, masyarakat mengetahui alasan di balik keputusan tersebut dan dapat memberikan masukan, sehingga tercipta rasa saling percaya antara pemimpin adat dan warga.

Musyawarah menjadi sarana utama dalam menjaga keterbukaan. Ketika ada rencana pelaksanaan upacara adat, penggunaan lahan adat, atau penyelesaian masalah di lingkungan kampung, semuanya dibahas bersama. Proses ini membuat masyarakat merasa dilibatkan dan ikut bertanggung jawab atas keputusan yang telah disepakati. Jika muncul masalah di kemudian hari, penyelesaiannya juga dilakukan secara bersama-sama tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Pengelolaan sumber daya di Kampung Adat

## **REIMAJINASI AKUNTANSI SOSIAL: MODEL AKUNTABILITAS BERBASIS RITUAL DAN NORMA ADAT DI KAMPUNG CIKONDANG**

Cikondang juga menunjukkan adanya tanggung jawab sosial. Lahan dan sumber daya yang dimiliki kampung digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Masyarakat mengetahui siapa yang mengelola dan untuk tujuan apa, sehingga kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan. Pola ini memperlihatkan adanya pengawasan sosial yang berjalan secara alami di tengah masyarakat.

Selain itu, pengawasan terhadap perilaku warga dilakukan melalui aturan adat dan sanksi sosial. Apabila ada warga yang melanggar aturan, biasanya akan diberikan teguran atau sanksi adat sesuai kesepakatan bersama. Sanksi ini bukan bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan agar nilai-nilai kebersamaan tetap terjaga. Dengan demikian, setiap individu belajar untuk bertanggung jawab atas tindakannya kepada komunitas. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap leluhur menjadi dasar dari praktik akuntabilitas sosial di Kampung Adat Cikondang. Nilai-nilai tersebut membuat masyarakat memiliki kesadaran bahwa kehidupan bersama hanya bisa berjalan dengan baik jika setiap pihak mau bertanggung jawab dan saling menjaga kepercayaan. Praktik ini menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial dapat tumbuh secara alami dalam masyarakat adat tanpa harus bergantung pada sistem formal yang rumit.

### **Peran Musyawarah sebagai Sarana Pelaporan Sosial**

Musyawarah kampung berfungsi sebagai ruang pelaporan terbuka, di mana keputusan, penggunaan sumber daya, dan permasalahan sosial dibahas secara kolektif. Proses ini memungkinkan terjadinya transparansi sosial dan pengawasan bersama tanpa instrumen administratif formal. Dalam konteks Kampung Adat Cikondang, musyawarah memiliki peran sentral sebagai mekanisme akuntabilitas sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan kolektif masyarakat. Musyawarah bukan sekadar forum diskusi, melainkan menjadi ruang formal dan simbolik untuk menyampaikan, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan adat kepada seluruh anggota komunitas. Dalam perspektif akuntansi sosial, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk pelaporan sosial non-formal yang berbasis nilai-nilai lokal.

Musyawarah berfungsi sebagai media pelaporan sosial karena di dalamnya terjadi proses penyampaian informasi mengenai pengelolaan sumber daya bersama, pelaksanaan

ritual adat, penggunaan dana kolektif, serta keputusan-keputusan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Informasi tersebut disampaikan secara terbuka oleh pemangku adat atau pihak yang diberi amanah, kemudian ditanggapi oleh anggota komunitas melalui proses dialog dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan melalui laporan tertulis, melainkan melalui komunikasi lisan yang bersifat partisipatif.

Dengan demikian, musyawarah dapat diposisikan sebagai model alternatif pelaporan sosial yang mencerminkan akuntabilitas berbasis budaya. Reimajinasi akuntansi sosial melalui praktik musyawarah membuka ruang bagi pengembangan pendekatan akuntansi yang lebih inklusif, kontekstual, dan berakar pada kearifan lokal. Model ini menegaskan bahwa akuntansi tidak semata-mata bersifat teknis dan kuantitatif, tetapi juga merupakan praktik sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan budaya masyarakat.

### **Ritual Adat sebagai Legitimasi Akuntabilitas**

Ritual adat di Kampung Adat Cikondang berperan sebagai sarana legitimasi akuntabilitas sosial dan budaya dalam pengelolaan rumah adat serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Akuntabilitas dalam konteks masyarakat adat tidak diukur melalui laporan keuangan formal, melainkan melalui kepatuhan terhadap norma adat, nilai-nilai luhur, dan amanat leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui ritual adat seperti Seren Taun dan Ngaruat Lembur, masyarakat membangun konsensus sosial yang kuat, mempererat solidaritas, serta menciptakan kontrol sosial agar setiap individu, termasuk juru kunci dan pengurus rumah adat, menjalankan tanggung jawabnya sesuai aturan adat yang berlaku.

Ritual adat juga berfungsi sebagai mekanisme pelaporan informal yang menyampaikan kondisi kesejahteraan kampung, keberhasilan panen, serta pengelolaan sumber daya alam dan rumah adat. Dalam prosesi ritual, keberhasilan maupun permasalahan yang dihadapi masyarakat tersirat dan menjadi bahan refleksi bersama. Hal ini mendorong adanya diskusi serta pertanggungjawaban moral dari pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, pelaksanaan ritual secara konsisten menjadi dasar legitimasi kepemimpinan juru kunci sebagai pemegang otoritas adat yang bertanggung jawab menjaga kelestarian tradisi dan tatanan sosial di tengah perubahan zaman.

# **REIMAJINASI AKUNTANSI SOSIAL: MODEL AKUNTANBILITAS BERBASIS RITUAL DAN NORMA ADAT DI KAMPUNG CIKONDANG**

Lebih jauh, ritual adat menegaskan akuntabilitas ekologis masyarakat Cikondang melalui penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam, seperti perlindungan hutan keramat dan larangan merusak lingkungan. Kepatuhan terhadap aturan adat tersebut menunjukkan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan hidup masyarakat. Dengan demikian, ritual adat di Kampung Adat Cikondang bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga keharmonisan sosial, spiritual, budaya, dan ekologis sesuai dengan ajaran leluhur.

## **Norma Adat sebagai Kontrol Internal Komunal**

Norma adat berfungsi sebagai sistem kontrol internal yang kuat dalam suatu komunitas. Hal ini dicapai melalui beberapa mekanisme utama, yang bekerja sama untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, dan kohesi sosial:

### 1. Pembentukan Identitas dan Solidaritas

Norma adat mendefinisikan apa artinya menjadi anggota komunitas tersebut. Kepatuhan terhadap norma-norma ini memperkuat rasa kepemilikan bersama, loyalitas, dan solidaritas di antara anggota komunitas, sehingga menciptakan tekanan sosial yang kuat untuk mematuhinya.

### 2. Sosialisasi Nilai

Melalui proses sosialisasi, baik secara formal (misalnya, upacara adat) maupun informal (misalnya, didikan keluarga), nilai-nilai dan harapan komunitas ditanamkan sejak dulu. Hal ini membentuk “hati nurani sosial” dalam diri individu, yang membuat mereka ter dorong bertindak sesuai aturan adat bahkan tanpa pengawasan eksternal. Sosialisasi ini juga berlangsung secara berkelanjutan melalui cerita rakyat, nasihat tokoh adat, kebiasaan sehari-hari, serta partisipasi dalam kegiatan budaya. Dengan demikian, individu tidak hanya memahami aturan adat secara teoritis, tetapi juga menghidupinya sebagai bagian dari kebiasaan dan karakter mereka.

### 3. Mekanisme Sanksi Sosial

Komunitas menerapkan berbagai bentuk sanksi terhadap mereka yang melanggar norma, seperti teguran lisan, pengucilan sementara, atau hukuman simbolis yang lebih berat. Ancaman sanksi sosial ini sering kali lebih efektif daripada hukuman formal,

karena menyentuh aspek psikologis seperti rasa malu, harga diri, dan penerimaan sosial. Selain itu, sanksi adat tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberi pelajaran dan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki diri.

#### 4. Penyelesaian Konflik

Norma adat biasanya mencakup prosedur khusus untuk menyelesaikan konflik secara damai, misalnya melalui musyawarah adat atau mediasi oleh tokoh adat. Norma adat dianggap adil dan sah oleh anggota komunitas karena diwariskan lintas generasi dan disepakati secara kolektif. Kepercayaan terhadap legitimasi ini mendorong penerimaan sukarela terhadap aturan adat. Lebih dari sekadar aturan, norma adat dipandang sebagai amanah leluhur dan kesepakatan moral yang mengikat. Karena dibangun berdasarkan pengalaman panjang komunitas itu sendiri, norma adat sering kali lebih kontekstual dan relevan dibanding aturan formal yang bersifat umum.

### **Implikasi terhadap Konsep Akuntansi Sosial**

Konsep akuntansi sosial di Kampung Adat Cikondang berimplikasi pada penguatan budaya kebersamaan dan nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat adat. Melalui pencatatan kontribusi sosial, iuran adat, kerja bakti, serta kegiatan ritual, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelola dana, tetapi juga sebagai sarana menjaga solidaritas dan partisipasi warga. Penerapan akuntansi sosial turut membentuk budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana adat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap tetua adat tetap terjaga.

Selain itu, dokumentasi aktivitas sosial dan adat membantu melestarikan nilai tradisi serta kearifan lokal sebagai memori budaya kolektif. Dalam konteks penerimaan dana dari wisata atau pihak luar, akuntansi sosial juga berperan penting untuk memastikan bahwa keputusan ekonomi tetap selaras dengan norma adat dan tidak mengarah pada komersialisasi berlebihan terhadap budaya. Dengan demikian, akuntansi sosial di Cikondang mendorong keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan melalui musyawarah serta partisipasi masyarakat adat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntabilitas sosial di Kampung Adat Cikondang tidak bergantung pada sistem akuntansi

## **REIMAJINASI AKUNTANSI SOSIAL: MODEL AKUNTABILITAS BERBASIS RITUAL DAN NORMA ADAT DI KAMPUNG CIKONDANG**

formal sebagaimana yang berkembang dalam akuntansi modern. Akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme budaya yang hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun, seperti musyawarah kampung, ritual adat, dan kepatuhan terhadap norma adat. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai sarana pelaporan, pengawasan, serta pertanggungjawaban sosial yang berbasis pada legitimasi kolektif dan nilai moral bersama.

Musyawarah berperan sebagai ruang pelaporan sosial yang terbuka, di mana keputusan dan pengelolaan sumber daya bersama dibahas secara partisipatif. Sementara itu, ritual adat berfungsi sebagai sarana legitimasi dan penguatan komitmen moral warga terhadap keputusan yang telah disepakati. Norma adat menjadi bentuk kontrol internal komunal yang efektif dalam menjaga ketertiban, kepercayaan, dan integritas pengelolaan kehidupan sosial masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik budaya dalam masyarakat adat dapat dipahami sebagai bentuk akuntansi sosial alternatif yang kontekstual dan bermakna. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman akuntansi sosial agar lebih inklusif terhadap praktik nonformal, serta kontribusi praktis dalam menawarkan model akuntabilitas berbasis kearifan lokal yang relevan bagi komunitas adat dan pengembangan akuntansi sosial di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological paradigms and organisational analysis*. London: Heinemann.
- Gray, R. (2002). The social accounting project and accounting, organizations and society. *Accounting, Organizations and Society*, 27(7), 687–708.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (2014). Accounting and accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting. London: Routledge.
- Mathews, M. R. (2004). Developing a matrix approach to categorise the social accounting literature. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 1(1), 30–45.
- Mulawarman, A. D. (2014). Akuntansi berbasis nilai dan budaya lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 1–15.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif. Bandung: Alfabeta.